

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pesta demokrasi Indonesia diadakan sekali untuk memilih individu dari delegasi parlemen, yang kita kenal sebagai ras administratif. Keputusan seharusnya menjadi jalan untuk mengisi situasi politik tertentu di kursi inisiatif. Pergeseran jabatan dari presiden, wakil presiden, utusan perseorangan dikenal dengan sebutan pengurus perseorangan atau DPR. DPR juga mengalami perubahan, seperti DPR RI, DPR teritorial (Dapil), atau DPR Bersama.

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia pada awalnya direncanakan untuk memilih individu dari organisasi delegasi, khususnya DPR, DPRD biasa dan DPRD. Setelah amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002. Perlombaan politik presiden dan wakil presiden yang semula dilakukan oleh MPR disetujui untuk diselesaikan langsung oleh perorangan dan dari perorangan dengan tujuan agar perlombaan politik resmi dikenang oleh rakyat rangkaian keputusan. Beberapa bagian dari perlombaan politik diadakan tanpa preseden untuk keputusan politik tahun 2004. Pada tahun 2007, mengingat UUD No. 22 Tahun 2007 pengangkatan kepala daerah provinsi dan kepala daerah perwakilan (pilkada) juga dimasukkan sebagai salah satu ciri dari sistem ras politik. Sebagai aturan umum, istilah keputusan politik lebih sering menyinggung penunjukan individu dari badan pemerintahan dan presiden yang diadakan secara berkala. Keputusan harus diselesaikan secara berkala, dengan alasan bahwa mereka memiliki kemampuan sebagai bagian dari metode manajemen untuk individu terhadap delegasi mereka. Putra, 2020)

Mengingat Peraturan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perlombaan Umum bagi Perorangan dari Panitia Pelimpahan Perorangan, Badan Pelimpahan Wilayah dan Pertemuan Utusan Perorangan pada bagian I pasal (1) ayat (1) menyatakan bahwa putusan merupakan cara bagi kekuasaan perseorangan untuk memilih orang-orang dari Kamar Agen Perorangan, orang-orang dari Panitia Delegasi Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta memilih orang-orang dari Musyawarah Bangsa Daerah Propinsi, yang dilakukan secara wajar, sungguh-sungguh, dalam keadaan negara kesatuan republik Indonesia yang berpandangan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Faisal Harahap & Fahmi, 2019)

Betapapun pentingnya suatu pemerintahan (negara) dalam mengatur dan memberikan rasa aman kepada kerabatnya, Islam tidak pernah memberikan model atau tipe negara tertentu. Sejalan dengan ini, kontras muncul di antara sarjana hukum dan pakar politik. Ada landasan utama dalam pengembangan permintaan negara dengan kerangka yang diambil sesuai dengan sosial-sosial masyarakat. Salah satunya adalah keputusan umum yang dapat diadakan seperti jarum jam dan setiap individu di Indonesia dihubungi dan menjadi konstituen keseluruhan ras yang dibingkai oleh otoritas publik melalui peraturan. Ketaatan terhadap otoritas publik merupakan komitmen yang harus dilakukan oleh setiap orang.

Atas dasar itu, menuntut setiap pemimpin, yang mendapat kepercayaan dari rakyat, untuk melibatkan pedoman pemikiran dalam setiap tugas dan mengejar pilihan-pilihan yang berhubungan dengan kepentingan rakyat. Kewajiban pemerintah untuk terus fokus pada keunggulan ini terkait erat dengan ajaran Islam tentang hubungan antara pemerintah dan kerabatnya.

Sehubungan dengan komunikasi, pemilu adalah pekerjaan untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan latihan penjelasan, publikasi, komunikasi massa, kampanye, dll. Dalam ras, warga negara yang disebut konstituen menjadi objek kampanye dengan proyek dan komitmen politik yang berbeda, sehingga konstituen dapat memutuskan mendukung orang-orang yang bersaing di pesta demokrasi atau hari raya kerakyatan.

Pada saat kerangka keputusan politik wakil rakyat (DPR RI, DPRD, DPR RI) menyentuh seluruh pelosok nusantara, sangat diharapkan klien pendukung tokoh masyarakat setempat secara terbuka untuk mengambil bagian dalam perkembangan keputusan politik. Termasuk Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Para tokoh masyarakat ikut andil dalam menyampaikan visi dan misi ke daerah setempat, untuk mencapai tujuan memenangkan salah satu pendatang baru di masyarakat Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Menjadikan tokoh daerah sebagai patokan dalam memilih. Terutama yang menyentuh kehidupan masyarakat Desa Jatimulyo. Untuk menyampaikan dan menggambarkan salah satu calon di Desa Jatimulyo, para tokoh masyarakat kelompok masyarakat langsung dikaitkan dengan rencana-rencana tertentu

sehingga dapat berdampak pada daerah setempat meskipun tidak ada tekanan dalam tantangan tersebut dan masyarakat setempat tidak merasa terganggu. Realitas semacam ini tidak dapat dipisahkan dari bagaimana komunikasi politik yang dilakukan para perintis daerah ini terjadi dalam aktivitas publik daerah setempat di Desa Jatimulyo. Berkonsentrasi pada kenyataan tersebut, ahli mencoba memusatkan perhatian sedemikian rupa dengan mengangkat judul kajian “Komunikasi Politik Tokoh masyarakat dalam menghadapi pemilu 2024” di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Tokoh masyarakat adalah tokoh masyarakat yang berdampak dan terlibat dengan kelompok ideologi dimana tokoh masyarakat berperan penting sebagai pengendali sosial dalam masyarakat. Selain berperan sebagai pengawal dan penguasa kualitas dan standar yang berlaku di mata masyarakat, para tokoh masyarakat juga berperan dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi, salah satunya di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

tokoh masyarakat Desa Jatimulyo menyatakan bahwa paguyuban sangat berperan penting dalam memberikan pembinaan politik yang baik kepada daerah menjelang Keputusan Politik 2024, perlu diberikan pendidikan politik yang baik sehingga mereka dapat memahami bagaimana menyelesaikannya. proses keputusan politik.

Salah satu pelatihan politik perintis daerah bagi daerah adalah tentang bagaimana menolak dan memperjuangkan isu-isu pemerintahan kontan dalam pengambilan keputusan, pendidikan politik ini lebih ditujukan untuk menjaga sistem berbasis suara di Indonesia.

Faktor pendukung dan penghambat dalam komunikasi politik dalam menyikapi pemilu politik legislatif 2024 di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember adalah kesamaan bahasa, budaya dan kedekatan yang mendalam dengan daerah setempat. Hambatannya adalah adanya keputusan-keputusan yang tidak sepenuhnya diselesaikan oleh daerah setempat dan adanya sikap yang berlebihan secara lokal sehingga para perintis daerah tidak mau mempersilakan individu untuk memilih siapa yang harus dihindari.

Komunikasi politik adalah kemampuan yang signifikan dalam kerangka politik. Dalam setiap siklus politik, komunikasi politik memiliki posisi yang

esensial. Memang komunikasi politik pun diekspresikan sebagai (tulang punggung) siklus politik. Bagaimana tidak, desain politik yang berbeda, misalnya parlemen, administrasi, kelompok ideologis, asosiasi non-legislatif, partai terselubung, dan penduduk biasa mendapatkan data politik melalui korespondensi politik. Setiap konstruksi memahami apa yang telah dan akan dilakukan berdasarkan data.

Komunikasi politik memanfaatkan banyak ide dari ilmu komunikasi, oleh karena itu, ilmu komunikasi tumbuh lebih dulu dari pada komunikasi politik. Ide-ide seperti komunikator, pesan, media, komunikasi, dan kritik juga digunakan dalam komunikasi politik. Perhatian utama dari kontras adalah bahwa komunikasi politik berfungsi dalam menyampaikan data politik. Selanjutnya, penting untuk terlebih dahulu memberi arti komunikasi politik. Menurut Rusdi Kantaprawira, seorang maestro hukum, gagasan komunikasi politik adalah penyambungan pemikiran-pemikiran politik yang hidup di mata publik, baik pertimbangan-pertimbangan dalam perkumpulan, afiliasi, organisasi maupun bidang kehidupan politik penguasa publik. Rusdi melihat komunikasi politik dari sifatnya yang bermanfaat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komunikasi politik tokoh masyarakat di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dalam menghadapi Pemilu 2024?
2. Apa faktor penghambat komunikasi politik tokoh masyarakat di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dalam menghadapi Pemilu 2024?
3. Apa faktor pendukung komunikasi politik tokoh masyarakat di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dalam menghadapi Pemilu 2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui komunikasi politik masyarakat Desa Jatimulyo dalam menghadapi Pemilu 2024

2. Mendeskripsikan faktor penghambat komunikasi politik tokoh masyarakat Desa Jatimulyo dalam menghadapi Pemilu 2024
3. Mendeskripsikan faktor pendukung komunikasi politik tokoh masyarakat Desa Jatimulyo dalam menghadapi Pemilu 2024

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sebagai usaha untuk menumbuhkan informasi dalam dalam konteks penelitian dan juga sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi, penelitian tentunya memiliki manfaat. Manfaat dalam eksplorasi adalah sesuatu yang signifikan, menyiratkan bahwa pemeriksaan harus memiliki pilihan untuk berkontribusi. Dengan demikian, manfaat pemeriksaan sebagaimana telah disadari bersama ada sekitar tiga hal sebagai berikut. (Mustari, 2013,158)

##### **1. Manfaat teoritis**

1. Dapat menyumbangkan tulisan dan pemikiran untuk semua pertemuan untuk memajukan disiplin logis dalam pengaturan logis korespondensi.
2. Dapat dimanfaatkan sebagai semacam perspektif atau kontes untuk eksplorasi tambahan untuk juga memperluas penelitian atau pemeriksaan masa lalu.
3. Untuk menambah pemahaman pemikiran dan komitmen epistemologis dalam informasi bagi penulis esai secara khusus dan untuk pengguna secara keseluruhan.

##### **2. Manfaat praktis**

1. Untuk memberikan pengetahuan tentang pran tokoh masyarakat sebagai dai dalam memperluas tanggung jawab masyarakat pada saat pemilu
2. Memberikan informasi kepada pembaca tentang tugas seorang tokoh sebagai dai dalam meyakinkan atau menjadi simbol dalam pengambilan keputusan pada pesta demokrasi pemilu

#### **1.5 Definisi Istilah**

Definisi istilah yang menjadi fokus penelitian ini perlu diuraikan untuk menegaskan dan membatasi pembahasan dalam penelitian ini; khususnya, komunikasi politik, tokoh masyarakat, dan komunikasi politik tokoh masyarakat terkait pemilu tahun 2024.

### 1.5.1 Komunikasi Politik

Dannimmo menegaskan (1999: 25) Salah satu fungsi partai politik adalah komunikasi politik, yang menyangkut penyaluran berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengorganisirnya sedemikian rupa sehingga memadukan kepentingan dan menimbulkan kepentingan yang harus diperjuangkan dalam kebijakan publik (public policy). kebijakan).

Dalam konteks penelitian ini, komunikasi mengacu pada penyampaian pesan oleh aktor atau komunikator partai politik untuk mempengaruhi masyarakat pada saat pemilihan legislatif.

Menurut etimologi, kata "politik" berasal dari kata Yunani "polis", yang berarti "kota" atau "negara". Fokus kajian ini lebih pada dinamika politik partai-partai demokrasi yang bersaing pada Pileg 2024 di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang masyarakatnya sangat menghormatinya dan dapat menjadi faktor yang mempersatukan bangsa dan negara. Tokoh masyarakat merupakan panutan bagi masyarakat yang berkecimpung dalam partai politik yang menggunakan jargon Islam dan memiliki pengaruh keagamaan.

### 1.6 Definisi Komunikasi Politik

Salah satu fungsi partai politik adalah komunikasi politik, yang bertujuan untuk menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengorganisirnya sedemikian rupa untuk memadukan kepentingan dan membentuk kepentingan yang dapat diperjuangkan menjadi kebijakan publik.

a. Faktor-faktor apa yang berperan dalam komunikasi politik dalam menghadapi pemilu 2024?

#### 1. Asumsi komunikasi politik

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kejelasan komunikasi politik itu sendiri adalah asumsi komunikasi politik yang dilakukan oleh komunikator tertentu dari sudut pandangnya. Jika komunikator politik atau praduga komunikan tentang komunikasi politik salah, maka sifat komunikasi politik yang sebenarnya dilakukan oleh mereka yang ditugaskan untuk melaksanakannya dapat berbeda.

## 2. Posisi Komunikator Politik

Posisi komunikator politik juga dapat berdampak pada komunikasi politik yang dilakukan oleh seorang komunikator politik. Dalam konteks politik negara, komunikator dalam hal ini bisa pemerintah atau oposisi, anggota legislatif, eksekutif, atau siapapun yang memiliki suara dalam bagaimana pemerintahan Indonesia dijalankan. Cara seorang komunikator politik menjalankan komunikasi politik secara efektif akan dipengaruhi oleh posisi komunikator tersebut.

## 3. Kuantitas komunikator atau komunikan politik

Jumlah komunikator atau komunikan yang terlibat dalam korespondensi politik juga dapat mempengaruhi gagasan komunikasi politik yang dilakukan. Karena banyaknya subjek atau objek yang terikat oleh berlangsungnya proses komunikasi politik, maka faktor yang satu ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sifat komunikasi politik. Menurut faktor ini, komunikasi politik dapat dibagi menjadi beberapa bagian.

## 3. Kekuatan komunikator

Kekuatan politik komunikator salah satu jenis faktor lain yang berpotensi mempengaruhi sifat komunikasi politik. Tujuan komunikasi politik mungkin untuk membujuk seseorang untuk mengikuti afiliasi politik komunikator jika komunikator memegang posisi politik yang kuat.

### A. Apa itu tokoh masyarakat dan siapa mereka?

Seseorang yang dianggap berpengaruh dalam masyarakat di sekitarnya adalah tokoh masyarakat. Kepala daerah (kepala desa, kepala dusun, lurah), sesepuh, orang yang memiliki kekuasaan (harta, benda), dan orang yang berilmu agama luas adalah contoh tokoh masyarakat.